

Evaluasi koordinasi pemerintah daerah dengan instansi vertikal di kabupaten daerah tingkat II barito selatan

Edy Purwanto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=96224&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian tentang Evaluasi Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat II Badto Selatan ini mengambil lokasi di Kabupaten Barito Selatan yang merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang di Propinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah 12-664 Km². Banyaknya program pembangunan yang diarahkan ke perdesaan yang melibatkan banyak pihak (Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat), sehingga kerjasama melalui koordinasi merupakan salah satu masalah dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan. Dalam rangka memacu pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan periode tahun 1996 s/d 2001 mencanangkan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Panca Program Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan dalam implementasi kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Badto Selatan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi koordinasi tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan dimensi-dimensi kegiatan koordinasi, yaitu ketentuan formal koordinasi (hak, wewenang, tanggungjawab koordinasi), koordinasi yang dilakukan pada awal kegiatan, penetapan sasaran atau tujuan bersama (kesepakatan terhadap kegiatan, lokasi, jadwal dan pembiayaan), kesadaran masing-masing pihak dalam melakukan koordinasi, komitmen terhadap kesepakatan (sinkronisasi kegiatan melalui laporan, keterangan tertulis dan lisan), serta hambatan-hambatan dalam berkoordinasi.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan mengadakan wawancara tidak terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data-data mengenai koordinasi Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, sehingga tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat koordinasi tersebut dapat dipaparkan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa koordinasi dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini terjadi karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu kurang memadainya wewenang Kepala Daerah selaku koordinator pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, kurang memadainya prasarana, sarana transportasi dan kurang memadainya sarana komunikasi, serta belum tersedianya data yang baik sebagai bahan

pendukung kegiatan koordinasi.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, akan lebih baik apabila penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dan urusan-urusan Pemerintah Daerah yang menjadi wewenangnya diatur oleh daerah itu sendiri, terutama daerah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, setidaknya persoalan koordinasi dengan Instansi Vertikal khususnya, menjadi tanggungjawab Kepala Daerah. Demikian pula halnya dengan pertanggungjawaban seluruh Instansi atau Unit Organisasi pemerintah di daerah, hanya pada Kepala Daerah. Faktor-faktor lain yang menjadi masalah dalam pelaksanaan koordinasi di daerah, perlu sekali mendapat perhatian prioritas dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam arti perlu mendapat peningkatan melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan, sehingga dengan membaiknya faktor-faktor tersebut akan mendukung pencapaian optimalisasi pelaksanaan koordinasi.

Abstract

The research location of Evaluation Coordination Of Local Government With Vertical Instance In Regency Of Barito Selatan was took at Barito Selatan Regency. The Regency of Barito Selatan is the one from five regency which area in Kalimantan Tengah Province, with territory wide is 12.664 square meters.

A few of development program that direct to rural community are involved many institution, such as government institution, non government organization, and community institution. Its means the cooperation with used coordination was became a problem in policy implementation of local development program in Barito Selatan Regency. To accelerate local development, the regency government of Barito Selatan period 1996-2001 has proclaimed a local development policy that poured fourth in Five Regional Program of Barito Selatan Regency (Panca Program Daerah Barito Selatan).

The aims of this research is to describes the activity of coordination which has been carried out in the frame of to implementation of local development program of Barito Selatan Regency and to analyze a few factor that influence the activity of coordination.

The answer all the question of thus research, the researcher was used such coordination activity dimension as a formal coordination regulation, such like right, authority, and coordination liability. It connected with the initial stage, like activity, location, schedule, and finance. Awareness of each units to carried out coordination, commitment on agreement such as synchronize activity by using a report, written and oral information, is a must. Also such of obstacle in coordination that should be applied are completely write in this research.

This research was used qualitative research method is because qualitative research method is constitute a research procedure that produce descriptive data, is it direct or indirect from informant. In this research, the researcher carried out direct observation in research location and also carried out unstructured and depth interview to obtain such of data that used to answer all question.

The yield of this research are show that coordination of local government with vertical instance in Barito Selatan Regency was not good and optimal in implementation. It was because, there were a few factor that influence, such like the authority of district head as a government operation and local development program

coordinator is mild The tool and in_n'astr1ictur and the means of community and transportation is also mild Data to proponent wordination activigr is also unavailable.

In the frame of realization of regional authority, it will be mitch better- d government implementation in territory and all of matter of local government are arrange by the territory it self espccialhr regency and town. tts means alt of coordination problem that related with vertical instance are become district head responsibiligr and it is also with the responsibiligr all of instance in each territory.

Beside that, another factor such like means and irmusrritctiir that related with coordination activity are need to increase and getting a priority attention from the central government and local government. At least U' all factors that related with coordination activity are become better, it will iryhience to e_/Yective coordination activity achie vernenl.</i>